

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. 2006. *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Bellinger WK. 2007. *The Economics Analysis of Public Policy*. Routledge: Oxon.
- Blane D. Lewis. 2015. *Desentralisasi Desa di Indonesia*. Australian National University.
- Budi Setyo. 2009. *Efisiensi Relatif*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Devas, Nick. 1989. *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*. Jakarta: UI-Press.
- Edy, 2008. *Manajemen Operasi*. Edisi Ketiga. Jakarta: Grasindo.
- Eko, Sutoro dan Abdul Rozak. 2005. *Prakarsa Desentralisasi dan Otonomi Desa*. Yogyakarta: IRE Press.
- Halim Adul, Mujib Ibnu 2009. *Problem Desentralilisasi dan Perimbangan Keuangan Pemerintahan Pusat-Daerah, Peluang dan tantangan dalam pengelolaan Sumber Daya Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Sekolah Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada.
- Handoko, T. Hani. 1995. *Manajemen*. Yogyakarta: BPFE.
- Kartohadikoesoemo, Soetardjo. 1984. *Desa*. Yogyakarta: PN Balai Pustaka.
- Kirmanto, Djoko. 2006. *Peluncuran Program Peningkatan Infrastruktur Pedesaan (PIIP)*, Sambutan Menteri Pekerjaan Umum.
- Kristanto, D. 2014. "Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum dan Tingkat Pengangguran Terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Brebes Tahun 1997-2012". *Skripsi*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Kuncoro. 2004. *Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah dan Kebijakan*. Yogyakarta:UPP AMP YKPN.
- Mahmudi: 2007. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Matridi, RA., Zuraidi, D., Setyadiharja, R., Sanopaka, E., Effendi, D., Utari, D.S. 2014. An Evaluation of P3DK (An Acceleration of Development Village Program): A Reviewing on Failure Toward Revolving Loan Fund System in Kepulauan Riau Province, Indonesia. *Procedia – Social and Behavioral Sciences* 169. 189-197.
- Maurice, S.C. and Thomas, C.R. 1995. *Managerial Economics*. Chicago: Richard D. Irwan, Inc.

- Muhammad Fajar Gumilang. 2017. “Analisis Dampak Alokasi Dana Desa Terhadap Kemiskinan di Kabupaten Bogor”. *Skripsi*. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Nicholson, Water. 1995. *Teori Makro Ekonomi: Prinsip Dasar dan Perluasan*. Edisi Kelima. Terjemahan: Danel Wijaya. Jakarta: Bina Rupa Aksara.
- Nizar R. 2014. “Analisis Determinan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2009-2012”. *Skripsi*. Makassar: Universitas Mulawarman.
- Nurcholis, Hanif 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Penerbit Erlangga.
- Nurkse, Ragnar. 1953. *Problems of Capital Formation in Underdeveloped Countries*. New York: Oxford University Press.
- Osborne, David dan Gaebler, Ted. 1997. *Mewirauahakan Birokrasi (Reinventing Government)*. Jakarta: Teruna Gravika.
- Ragnar Nurkse. 1953. *Problems of Capital Formation in Underdeveloped Countries*. New York: Oxford University.
- Teer Haar. 1985. *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*. Jakarta: Pradya Paramita.
- Salvatore, Dominic. 2005. *Managerial Economics*. Fifth Edition. Singapore: Thomson Learning.
- Saputra, I Wayan. 2016. “Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Lembean Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli Tahun 2009-2014”. *Jurnal Jurusan Pendidikan Ekonomi*. Vol. 6 No. 1.
- Sasongko, A. 2013. *Analisis Dampak Pembangunan Sektor Pertanian Terhadap Tingkat Kemiskinan dan Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Aceh*. Skripsi. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Santoso, Budi. 2009. *Manajemen Proyek*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Siagian, Bukit Buchori, Maryunani, Rahmad Krishna Sakti dan Dwi Budi Santoso. 2016. Efficiency And Effectiveness Analysis Of Village Financial Management (Vfm) (Case Study Asahan Regency). *International Journal of Social and Local Economic Governance*, 2 (2) h: 136-151.
- Soemodiningrat, Gunawan. 2003. *Membangun Perekonomian Rakyat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suharto, Edi. 2016. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: Refika Aditama.

- Suryawati, C. 2005. *Memahami Kemiskinan Secara Multidimensional*. Jurnal Kemiskinan. 8(3): 121-129.
- Taliziduhu, Ndraha. 1991. *Dimensi-dimensi Pemerintahan Desa*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Todaro P, Smith SC. 2006. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, Edisi Kedelapan. Jakarta: Erlangga.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang. Otonomi Daerah
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan Atas UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang. Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang. Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah
- Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 72 Tahun 2005 Tentang Pemerintahan Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tatacara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota kepada Desa.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 690.900-327 tahun 1996 tentang kriteria penilaian dan kinerja keuangan
- Surat Mendagri No.140/640/SJ Tahun 2005 perihal “Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa
- Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No.140/640/SJ, tanggal 22 Maret 2007 perihal “Pedoman Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa
- <https://www.Jayapurakota.bps.go.id/Page2>
- <https://www.kemenkeu.go.id/Page2/rincian-dana-transfer-ke-daerah-dan-dana-desapbn-p-tahun-anggaran-2015>, diskres pada tanggal 24 Maret 2018.
- <http://www.keuangandes.com/wp-content/uploads/2016/04/Alokasi-Dana-Desa-2016.pdf>, diskres pada tanggal 29 Maret 2018.